

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Ketimpangan pendapatan dan kekayaan telah menjadi permasalahan yang mengalami peningkatan tajam dalam beberapa dekade terakhir. Di Prancis, ketimpangan pendapatan meningkat setelah pemerintah menaikkan pajak bahan bakar bensin dan solar masing-masing sebesar 15% dan 23% pada Oktober 2018. Kebijakan ini menyulitkan masyarakat kelas menengah ke bawah yang mengandalkan mobil sebagai transportasi sehari-hari. Kenaikan pajak bahan bakar mempengaruhi masyarakat kelas pekerja di daerah pedesaan, di mana orang-orang hampir secara eksklusif mengandalkan mobil untuk bepergian. Kebijakan kenaikan pajak bahan bakar memicu munculnya gerakan sosial yang disebut Gerakan Rompi Kuning (GRK). Gerakan ini memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah Prancis di bawah kepemimpinan Presiden Emmanuel Macron, terutama kebijakan kenaikan pajak bahan bakar. Mereka melakukan protes melalui berbagai upaya yang meliputi aksi demonstrasi di jalanan dan menyebarkan protes secara daring melalui media sosial *Facebook*.

Dalam penelitian ini, proses GRK dalam melakukan protes terhadap kenaikan pajak bahan bakar di Prancis, dianalisis menggunakan teori *Collective Action Framing*. Dalam teori ini, terdapat tiga hal yang harus diwujudkan, yang didefinisikan sebagai *diagnostic framing*; *prognostic framing*; dan *motivational framing*. Ketiga indikator ini digunakan dalam menganalisis guna mencapai tujuan penelitian. *Diagnostic framing* adalah mengidentifikasi “korban” ketidakadilan dan mendefinisikan pelaku ketidakadilan tersebut. *Prognostic framing* adalah

menawarkan solusi untuk masalah yang terjadi, atau setidaknya rencana serangan, dan strategi untuk melaksanakan rencana tersebut. *Motivational framing* adalah memberikan "seruan untuk bertindak" atau alasan untuk terlibat dalam tindakan kolektif yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan, termasuk menciptakan kosa kata atau jargon yang memotivasi.

Pada *diagnostic framing*, GRK melakukan dua hal. Pertama, mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai korban dari ketidakadilan kebijakan pemerintah, terutama kebijakan kenaikan pajak bahan bakar. Kedua, Presiden Emmanuel Macron didefinisikan sebagai pelaku ketidakadilan tersebut. Pada *prognostic framing*, GRK melakukan aksi protes yang dilakukan setiap hari sabtu dan menyebarkan gerakan secara daring melalui *Facebook*. Upaya-upaya ini dilakukan guna menuntut pemerintah Prancis untuk membatalkan kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat, terutama kebijakan kenaikan pajak bahan bakar. Tuntutan-tuntutan yang disuarakan oleh GRK diajukan sebagai solusi dari masalah ketimpangan yang disebabkan oleh pemerintah Prancis dibawah kepemimpinan Presiden Macron. Pada *motivational framing*, GRK menjadikan rasa nasionalisme yang berakar dari semboyan '*Liberté, Egalité, Fraternité*' yang dicetuskan selama Revolusi Prancis pada tahun 1789 sebagai alasan untuk melakukan tindakan kolektif guna memperbaiki keadaan. Sementara itu, dalam hal menciptakan kosa kata atau jargon yang memotivasi, GRK menyerukan berbagai jargon yang memperlihatkan kemarahan mereka terhadap pemerintahan Presiden Macron dan mengajak semua orang untuk bersatu melawan pemerintah yang telah menyebabkan ketimpangan di Prancis meningkat.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh GRK telah memenuhi tiga hal yang harus terwujud dalam *collective action framing*. Pemenuhan tiga hal ini mengantarkan GRK pada keberhasilan. Gerakan ini berhasil menyebabkan pembatalan kenaikan pajak bahan bakar di Prancis hanya 18 hari setelah protes dimulai.

5.2 Saran

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis terbuka untuk menerima saran dan kritik guna membantu penelitian ini menjadi lebih baik. Selain itu, penulis ingin memberikan saran terhadap peneliti selanjutnya yang ingin meneliti terkait Gerakan Rompi Kuning dalam melakukan protes terhadap pemerintah Prancis untuk dapat memperbanyak sumber data dan informasi yang akan digunakan dalam melakukan penelitian.

